

## **Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

**Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar<sup>1</sup>, Yosafat Aji Pranata<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>yosafat.ap@gmail.com

*Received: 28 Januari 2023; Revised: 31 Agustus 2023; Accepted: 21 September 2023*

### **Abstract**

*One of the primary needs of human beings is building and owning a home. A home has an important role in life. A home is also a beginning of a civilization, we also can learn many things from our home. Therefore, without a home, human beings will suffer and will not survive. A home needs to fulfill the livable criteria so the resident can feel safe and comfortable while living inside their house. However, not all houses fulfill the livable criteria, one of the major factors is extreme poverty. In Indonesia, extreme poverty can be caused by many factors, one of them is low income. Extreme poverty can have a major impact on the condition of houses. One of the poorest provinces in Indonesia is East Nusa Tenggara, with a percentage of poverty in cities and villages at 20.50%, this number was obtained by the Indonesia Central Bureau of Statistics in March 2022. This journal aims to deliver the contribution of Maranatha Christian University students who became an intern at MSIB Kampus Merdeka Batch 3 at the Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing (PUPR) with the Self-Help Housing Stimulant Program (BSPS) in Kupang City, East Nusa Tenggara.*

**Keywords:** *extreme poverty; kupang city; livable criteria; self-help housing stimulant program (BSPS)*

### **Abstrak**

Kebutuhan primer manusia salah satunya adalah membangun dan memiliki tempat tinggal. Rumah memiliki peran penting dalam kehidupan. Rumah juga menjadi sebuah awal peradaban dimana dari rumah kita dapat belajar banyak hal. Sehingga, tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan dan bertahan hidup. Sebuah tempat tinggal juga harus memenuhi kriteria layak huni agar penghuni dapat merasa aman dan nyaman saat didalam rumah tersebut. Namun faktanya tidak semua rumah masuk kedalam kategori layak huni, salah satu faktor utamanya diakibatkan oleh kemiskinan ekstrim. Di Indonesia, kemiskinan ekstrim mampu diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Kemiskinan ekstrim ini juga dapat berpengaruh besar terhadap kondisi tempat tinggal. Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan dengan jumlah sebesar 20.50%. hasil ini diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2022. Jurnal ini memiliki tujuan untuk menyampaikan hasil kontribusi dari mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang menjadi seorang peserta magang di MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 pada Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dalam mengatasi kemiskinan ekstrim bidang perumahan masyarakat dengan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

**Kata Kunci:** Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); kemiskinan ekstrim; Kota Kupang; Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

## A. PENDAHULUAN

Menjadi seorang mahasiswa merupakan tanggung jawab yang besar dan harus menjadi pribadi yang aktif dan mandiri dalam kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan yang dilakukan tentunya merupakan kegiatan positif yang dapat mendukung meningkatkan kemampuan, baik itu *hardskills* ataupun *softskills* mahasiswa. Tentunya dalam hal ini peran instansi baik dari pihak sekolah maupun kampus dan sebagainya, perlu mendukung secara penuh dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki para pelajarnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Universitas Kristen Maranatha juga turut mengambil peran dalam membantu mengembangkan kemampuan akademik maupun nonakademik agar mendukung negara ini menjadi negara maju. Salah satu langkah yang didukung adalah mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswinya untuk mengikuti program Magang & Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program ini memiliki kebijakan dan keuntungan yang berbeda dari program magang dari biasanya. Program ini juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa dan mahasiswi agar dapat melaksanakan kegiatan di luar program studi dan mendapatkan pengalaman untuk mempraktikkan ilmu yang didapat dalam lingkungan yang nyata, selain itu program ini juga mendukung mahasiswa dan mahasiswi dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan seperti bantuan Bantuan Biaya Hidup (BBH), fasilitas biaya perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi magang, dan juga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Tujuan program ini juga bisa dijadikan sebuah alternatif pengganti dari mata kuliah Magang atau Kerja Praktik (KP) atau juga sebagai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Salah satu mitra yang menyediakan lowongan program magang dalam MSIB Angkatan 3 pada Tahun 2022 adalah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Kementerian Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan di bidang konstruksi. Kementerian PUPR memfokuskan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2020.

Kegiatan magang yang mulai dilaksanakan pada 18 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023 atau kurang lebih 5 bulan jika terhitung pendaftaran yang merangkul banyak pekerjaan, Adapun posisi yang diberikan adalah Pendamping Fasilitator Teknik kegiatan BSPS dan Pendamping Fasilitator Pemberdayaan Kegiatan BSPS.

Sebagai asisten dari Tenaga Fasilitator Lapangan tentunya tugas yang didapat juga tidak jauh berbeda, namun salah satu tugas utama dan paling penting adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berlangsung selama periode yang ada. Sebagai mahasiswa magang tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Berperan dalam membantu menjalankan sebuah program dari pemerintah dengan tujuan yang mulia, yaitu mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bukanlah sebuah hal yang mudah, pasalnya dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Terutama saat menghadapi masyarakat dengan tingkat

## Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

---

Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, serta memiliki perbedaan latar belakang dan bahasa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki pulau lebih banyak dari provinsi lain, terdapat 1.192 pulau dalam provinsi ini. Tentunya dari sekian banyak pulau tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan perhitungan yang matang serta pembangunan yang merata agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di provinsi ini. Salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan adalah pembangunan rumah tinggal. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Periode 2019-2024 menyampaikan sebuah instruksi bahwa Kementerian PUPR perlu mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, salah satunya dengan melalui perbaikan rumah. Sehingga, sejak 2021 hingga 2024 mendatang, pemerintah berupaya mencapai target, yaitu mengatasi kemiskinan ekstrim di 514 Kabupaten dan Kota agar persentase kemiskinan ekstrim mencapai di bawah 1%. Hasil dari instruksi tersebut, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, memilih untuk memfokuskan beberapa aspek melalui programnya, di antaranya adalah percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui peningkatan kualitas RTLH, penanganan *stunting* dan penderita TBC, serta penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi.

Kata miskin memiliki arti bahwa miskin adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Sementara itu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations* (UN) pada tahun 1996 menjelaskan bahwa Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (*United Nations*, 1996). Tingkat kemiskinan ekstrim dapat diukur menggunakan “*absolute poverty measure*”

yang konsisten antarnegara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki pengasihan di bawah US\$1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*)/paritas daya beli, atau setara dengan Rp29.378 (30 Desember 2022). Lingkungan yang tidak sehat tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan manusia, terutama seorang anak. Masa balita merupakan sebuah periode yang sangat peka terhadap lingkungan sehingga diperlukan perhatian lebih terutama kecukupan gizinya. Salah satu yang menjadi prioritas pemberantasan oleh pemerintah adalah kondisi *stunting*, Dikutip dari laman web Kementerian Kesehatan, *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Diharapkan dengan adanya perbaikan lingkungan hidup, akan memperbaiki kesehatan dari penghuninya terutama generasi penerus bangsa.

Kota Kupang memiliki luas wilayah sebesar 180.3Km<sup>2</sup> atau sekitar 18.030 hektar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Kota Kupang (2020), kota ini memiliki 442.758.000 jiwa penduduk, dengan tingkat persentase kemiskinan sebesar 8.61% per tahun 2022. Tentunya angka 8.61% bukanlah angka yang baik, ditambah lagi dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) provinsi ini berjumlah Rp 1.950.00 yang sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan UMP Kota Jakarta sebesar Rp 4.641.854. Hal ini masih menjadi target pemerintah Kota Kupang untuk menangani kemiskinan ekstrim, ditambah lagi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tingkat kemiskinan provinsi ini sebanyak 20.05% dari 1.131.620 penduduk.

Tentunya hal-hal tersebut terkoneksi dan saling berhubungan, perlu adanya sebuah program dari pemerintah yang mampu membantu mengurangi masalah tersebut. Maka dari itu salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia, pemerintah memberikan program-program

yang inovatif dan terintegrasi, salah satunya adalah Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Terdapat kata “stimulan” dan “swadaya” yang kurang umum bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stimulan adalah sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, atau pendorong dan perangsang. Untuk kata “swadaya” adalah kekuatan tenaga sendiri. Sehingga arti dalam garis bahasa yang ada bahwa program ini merupakan sebuah pendorong bagi masyarakat untuk dapat mengerjakan pembangunan rumah mereka dengan tenaga sendiri, uang sendiri, atau bantuan orang lain. Penyelenggaraan program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat di Indonesia untuk bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.

Pemerintah membentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau disingkat BP2P yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya yang termasuk BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. BSPS memiliki sebuah tujuan yang terfokus dalam beberapa aspek, aspek-aspek. Hal ini merupakan sebuah poin penting yang perlu dituju dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, menjalankan instruksi Presiden, dan memenuhi tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang ditentukan oleh *United Nations*. Dari ke tujuh belas tujuan, program ini terlihat berfokus menangani 3 tujuan, yaitu: (a) Tujuan 1, *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, (b) Tujuan 2, *Good Health and Well Being* atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (c) *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Sebuah program tentunya memiliki dasar hukum agar memperlancar segala urusan dan tujuannya, Berdasarkan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat

Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS sendiri memiliki 8 dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403).

Dari dasar-dasar hukum tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah dana untuk kebutuhan program ini, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dana yang diberikan oleh pemerintah untuk satu penerima bantuan adalah sebesar Rp20.000.000, dengan rincian, Rp 17.500.000 untuk material dan biaya lainnya dan Rp 2.500.000 untuk upah tukang. Dana tersebut digunakan sebagai stimulan untuk warga dalam membangun dan memperbaiki kondisi rumah. Dana tersebut berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **B. PELAKSANAAN DAN METODE**

Terdapat dua metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian ini, yang pertama adalah metode penerapan program BSPS. Penerapan program ini perlu beberapa tahapan sesuai pada Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan judul Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu melakukan persiapan kegiatan seperti melakukan pengusulan lokasi, lalu melakukan verifikasi/penilaian usulan, penetapan lokasi, seleksi/pengolahan data, dan penyampaian daftar calon penerima bantuan, perencanaan kegiatan, penyiapan masyarakat, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan rumah atau penghunian dan pemeliharaan, dan pembinaan rumah penerima bantuan. Metode pelaksanaan yang kedua adalah, melakukan beberapa metode pelaporan lain seperti pengambilan dokumentasi, penyusunan bahan presentasi akhir, menyusun laporan mingguan, dan

# Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

menyusun laporan akhir magang di Kampus Merdeka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

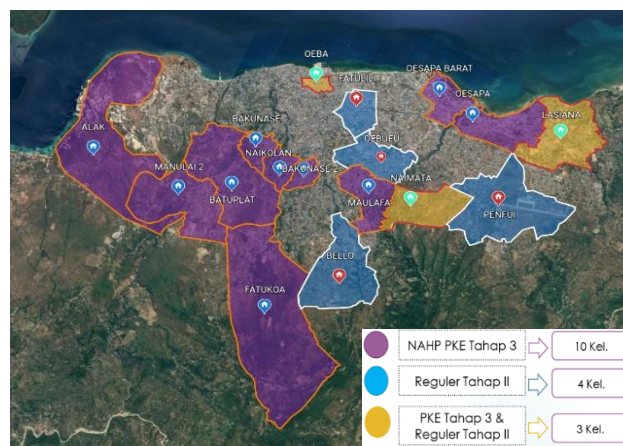
Dari hasil pemilihan penerima bantuan program BSPS pada tahun anggaran 2022, di Kota Kupang terdapat 87 penerima bantuan yang lolos dalam tahap verifikasi. 87 penerima bantuan tersebut tersebar di 17 kelurahan dari 51 kelurahan yang ada di Kota Kupang. Di dalam kota ini terdapat dua jenis sumber dana dari bantuan yang ada, yaitu Alokasi dana program Reguler dan program NAHP atau *National Affordable Housing Program*.

Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan BSPS di Kota Kupang, NTT, Indonesia (DJP, Kementerian PUPR, NTT, 2022)

Alokasi	Verifikasi	Eligible	SK PPK
NAHP PKE Tahap 3	650	136	66
Reguler Tahap II	21	21	21
Total			87

Kegiatan yang paling krusial dalam pengabdian kepada Masyarakat/magang ini adalah melakukan pengawasan, hal ini sangat penting dalam kegiatan konstruksi. Pengawasan pembangunan diperlukan untuk mengisi data pada laporan dan formulir yang tersedia. Pada kegiatan pengawasan terdapat beberapa hal yang ditemukan oleh peserta MSIB dan para pengawas lain/TFL, di antaranya yang paling sering adalah kesalahan dalam pembangunan konstruksi struktur rumah.

Menurut Siswono Yudohusodo (Rumah Untuk Seluruh Rakyat, 1991: 432), rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebuah sarana pembinaan keluarga. Sehingga tanpa adanya tempat tinggal manusia akan mengalami kesulitan melakukan kegiatan, bertahan hidup, dan melanjutkan kegiatan kesehariannya. Sehingga kondisi sebuah rumah harus layak huni untuk pemiliknya.



Gambar 1. Peta Sebaran Penerima Bantuan BSPS per Kelurahan di Kota Kupang, NTT

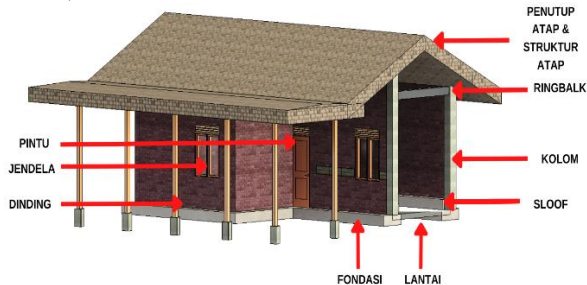


Gambar 2. Kegiatan Diskusi bersama Warga Penerima Bantuan BSPS dan Kegiatan Pengawasan Pembangunan

Hasil dari temuan di Kota Kupang, terdapat beberapa kondisi rumah penerima bantuan sudah sangat tidak layak untuk dihuni, terdapat temuan saat melakukan pengawasan bahwa banyak rumah yang hampir runtuh dikarenakan material rumah penerima bantuan sebelumnya sudah masuk kategori tidak layak pakai, data tersebut didapat saat melakukan penilaian kondisi rumah oleh pihak-pihak pemangku kebijakan. Diketahui bahwa mayoritas material dasar dari rumah tradisional penerima bantuan sebelum dilakukan perbaikan berasal dari kayu bebak gewang, kayu ini memiliki nama latin *Coryphan utan*, tanaman ini hanya akan berbuah dan berbunga sekali dimasa hidupnya. Pohon ini memiliki tinggi rata-rata sebesar 15-20 meter. Pohon palma ini hanya hidup di sekitar dataran rendah dan sekitar 300 mdpl. (Heyne, 1987 & Sastroadja, 1981).

Dalam kegiatan pengawasan, terdapat beberapa kesalahan-kesalahan struktural dan

non-struktural yang ditemukan, seperti kurangnya jumlah tulangan untuk komponen struktur hal ini dikarenakan tidak mengikuti anjuran standar penulangan kolom/ringbalk/sloof/balok yang tertera pada aturan SNI, PUPR maupun aturan Internasional seperti ACI 318 M-11 Pasal 10.9.2 yang menyatakan bahwa “menyatakan bahwa minimal harus dipasang empat buah tulangan memanjang untuk kolom dengan sengkang persegi atau lingkaran, minimal tiga buah untuk kolom berbentuk segitiga, serta minimal enam buah untuk kolom dengan sengkang spiral” (Badan Standardisasi Nasional, 2019). Terdapat juga temuan bahwa rumah penerima bantuan tidak memiliki ventilasi dan pintu pada bagian kamar, dapur, dan kamar mandi. Mengakibatkan bau yang tidak sedap di dalam rumah, hal ini melanggar aturan pada Petunjuk Teknis Program BSPS yang seharusnya adalah penghawaan suatu rumah diperlukan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan. (Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021)



Gambar 3. Komponen Struktural dan Non-Struktural Sebuah Rumah

Terdapat dua tipe perbaikan yang ditawarkan oleh pemerintah dan dapat dipilih oleh penerima bantuan untuk perbaikan rumah, yang pertama adalah metode konvensional dan yang kedua adalah metode perkuatan ferosemen.

Perlu diketahui bahwa pengerjaan dan penentuan komponen yang digunakan untuk membangun sebuah rumah yang benar harus sesuai dengan aturan yang ada. Seluruh rumah perlu memiliki komponen-komponen struktural maupun non-struktural yang tertera pada Gambar 2 dan memenuhi penilaian yang

ada. Penilaian ini berbasis pada beberapa Buku Aturan atau Standar Nasional Indonesia (SNI), di antaranya adalah menggunakan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-gedung. Bahan perkuatan menggunakan metode konvensional biasanya menggunakan komponen struktural seperti kolom beton bertulang, balok induk bertulang, dan ringbalk bertulang. Tulangan yang digunakan berjenis baja yang telah memiliki label SNI.



Gambar 4. Pelaksanaan Metode Ferosemen bersama Pihak Yayasan Adra

Untuk metode ferosemen sendiri memanfaatkan beberapa bahan yang berbeda dengan Metode Konvensional, bahan-bahan tersebut adalah: (1) Paku payung/paku seng, (2) Paku beton, (3) Ram kawat dengan  $\pm \geq \emptyset 1\text{mm} - 2,5 \times 2,5\text{cm}$  dan lebar 100 cm, (4) kawat ikat/kawat bendrat, (5) Semen berlabel SNI, (6) Pasir bersih, (7) Botol kecap atau botol saus dengan moncong yang panjang, (8) gunting kawat, (9) ember, sendok semen, dan roskam, (10) Palu, (11) Bor atau alat pengganti bor. (Teddy Boen, 2015)

Tabel 2. Persentase Status Pembangunan Program BSPS di Kota Kupang, NTT, Indonesia (DJP, Kementerian PUPR, NTT, 2022)

Metode Perbaikan	Jumlah Rumah	Persentase Status Pembangunan
Konvensional	78	85-100%
Ferosemen	11	30-60%

## Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

Setelah melakukan kegiatan dan rekapitulasi data selama beberapa bulan hingga Desember 2022, didapatkan hasil yang belum memuaskan. Hal ini dikarenakan masih terdapat setidaknya 11 dari 87 rumah yang belum selesai per 31 Desember 2022.

Dari hasil pengawasan, terdapat hasil di mana penerima bantuan yang menggunakan metode perbaikan dengan menggunakan metode ferosemen tidak sanggup selesai hingga 31 Desember 2022. Selama pembangunan menggunakan Metode Ferosemen, hal yang sering menjadi kendala adalah ketidakmauan pekerja bangunan untuk bekerja menggunakan metode tersebut. Ketidakmauan tersebut berasal dari rasa tidak mau belajar hal baru, tidak mengerti metode tersebut, dan ketidaksesuaian upah yang diberikan. Padahal, pihak Asisten Tenaga Fasilitator Lapangan hingga pihak Yayasan ADRA Indonesia sudah memberikan contoh cara pengerjaannya, namun tetap saja pekerja tidak mau melanjutkan pekerjaan.



Gambar 3. Kegiatan Pemasangan Peneng BSPS bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Kota Kupang

Masalah umum yang ditemukan dalam pengerjaan kedua metode ini adalah masalah biaya dan pekerja, dengan penghasilan penerima bantuan yang kurang lebih  $\leq$  UMR Kota Kupang, pembangunan dapat terhambat akibat kekurangan biaya. Kota ini tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2021 pernah menyentuh suhu sebesar  $35^{\circ}\text{C}$ , tentunya cuaca yang panas sangat mempengaruhi kinerja pekerja terutama pada siang hari. Selain itu, dengan upah yang minimum, dengan total upah Rp.2.500.000, banyak pekerja yang tidak

mau menerima upah pekerjaan sebanyak itu, dampaknya banyak penerima bantuan yang bekerja sendiri dan memanfaatkan tenaga dari tetangga ataupun keluarga yang ada. Sering ditemukan bahwa penerima bantuan melakukan kegiatan yang cukup riskan, seperti menjual aset kekayaan yang dimiliki hingga melakukan peminjaman uang. Tentunya hal ini patut untuk menjadi perhatian bersama dan dapat diberikan solusi lain agar tidak menyusahakan penerima bantuan.

Kegiatan pengabdian lain selain melakukan pengawasan adalah melakukan Pengukuran komponen struktural dan non-struktural di lapangan, pengambilan dokumentasi, menggambar teknis menggunakan perangkat lunak *AutoCAD*, mendesain bangunan menggunakan perangkat lunak *Revit* dan *Lumion 9*, dan melakukan kegiatan pemasangan peneng BSPS.

### D. PENUTUP

#### Simpulan

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk magang pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur didapat beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

1. Program MSIB Kampus Merdeka yang merupakan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18 memberikan kesempatan untuk pesertanya untuk menjadi lebih berkembang dalam kemampuan lunak (*softskills*) dan kemampuan keras (*hardskills*) serta mampu membuat peserta untuk beradaptasi menghadapi lingkungan baru seperti lingkungan perkantoran dan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.
2. Kegiatan yang dilakukan peserta program MSIB Kampus Merdeka dengan membantu menerapkan Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bersama Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Nusa Tenggara Timur berjalan cukup efektif hal ini dibuktikan dengan rampungnya pembangunan & perbaikan 76 dari 87 rumah per 31 Desember 2022.

3. Terdapat 11 rumah yang menjalankan perbaikan menggunakan metode ferosemen terhambat selesai hingga 31 Desember 2022 atau akhir masa anggaran. Di antaranya adalah (1) Kurangnya rasa tanggung jawab penerima bantuan dalam pembangunan, (2) Tidak paham pengerjaan Pembangunan menggunakan metode baru dan sulitnya menerapkan metode baru (3) Pembangunan terhenti akibat penerima bantuan dan atau pekerja bangunan mabuk-mabukan hingga bersikap dan berkata kurang menyenangkan kepada Asisten TFL dan TFL.
4. Terdapat temuan kesalahan struktural yang tidak sesuai dengan SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung dan Penjelasan, SNI 1727:2020 tentang Beban Desain Minimum dan Kriteria Terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain, dan SNI itu adalah SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung, seperti pemasangan tulangan pokok memanjang yang kurang, pemasangan sengkang yang tidak kuat, dan pengecoran *sloof* yang tidak simetris. Hal ini menyimpulkan bahwa perlu adanya edukasi dasar mengenai pemasangan tulangan yang benar.
5. Terdapat temuan pada rumah lama dari penerima bantuan yang yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, Surat Edaran Nomor 3/SE/Dr/2021 Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seperti temuan sanitasi yang tidak layak dan sulit dijangkau, *septictank* yang tidak dibersihkan selamat 5 tahun, serta penghawaan yang kurang dari 5%. Hal ini membuktikan bahwa kondisi rumah lama

dari penerima bantuan tidak layak untuk dihuni dan perlu diperbaiki.

### Ucapan Terima Kasih

Kegiatan dan jurnal ini tidak akan bisa ada jika tanpa pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan jurnal ini mampu untuk membantu calon peserta magang di program MSIB Kampus Merdeka ataupun pihak lain yang membutuhkan jurnal ini sebagai wawasan, panduan, dan ilmu pengetahuan. Dengan kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa berterima kasih kepada: (1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia dan pihak program Magang atau Studi Independen Bersertifikat Angkatan 3 Kampus Merdeka, (2) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara Timur, (3) Beberapa pihak dari Yayasan ADRA Indonesia, (4) Koordinator dan seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Kupang 2022, (5) Mentor di lokasi kegiatan MSIB Angkatan 3, (6) Seluruh dosen dan staff yang mendukung penulis di Universitas Kristen Maranatha, (7) Seluruh peserta magang program MSIB Kampus Merdeka Angkatan 3 di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nusa Tenggara

### E. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Persyaratan Beton Struktural untuk bangunan Gedung dan Penjelasan (ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD) SNI 2847:2019*. Jakarta
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung*. SNI 1726:2019. Jakarta
- Boen, T. (2015) *Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Balutan Lapisan Ferosemen*. Jakarta, Indonesia: CSI Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Surat Edaran Nomor*



**Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Miskin Ekstrim oleh Peserta MSIB  
Kampus Merdeka Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  
(BSPS) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur**

Prabu Mandvi Hafiz Anjar Suhendar, Yosafat Aji Pranata

---

3/SE/Dr./2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Jakarta. Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403)*. Jakarta

Heyne, K. (1987). *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Jakarta: Balitbang Kehutanan  
Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Tallar, R.Y. (2022) *Pengantar Ilmu Lingkungan dalam Teknik Sipil*. Bandung: CV. Zahir Publishing

Yudohusodo, Siswono. (1991), *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Indonesia: Barakerta